

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik, di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang mandiri dan mampu mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Maka Pada tahun 1999 pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintahan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, hal ini mengimplikasikan setiap daerah harus mampu mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah karena sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sesuai Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2004 bab VI pasal 10 bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan pembangunan

daerah (*capital investment*), antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) , dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Salah satu upaya untuk mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin adalah dengan menyusun anggaran (budget) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Anggaran merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian manajemen yang disusun organisasi dalam mencapai tujuan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien,

efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2004:182). Menilai Kinerja Keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai salah satu daerah otonom masih memiliki ketergantungan keuangan terhadap bantuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat Daya untuk mengelola Anggaran pemerintah mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

daerah (APBD). Hal tersebut dilakukan guna dapat mengetahui kemampuan keuangan dalam membiayai setiap program pembangunan di daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat menjadikan suatu alat penilaian kinerja keuangan dalam upaya perkembangan suatu daerah. Oleh karena itu penulis mengambil judul “**Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagai Alat Penilai Kinerja Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat Daya**”.

B. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai alat penilaian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat Daya ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Alat Penilaian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat Daya

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan menambah wawasan melalui

praktik nyata pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat Daya.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumba Barat Daya, dalam analisis perencanaan laba dan anggaran sebagai alat penilaian kinerja secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan analisis anggaran pendapatan belanja daerah sebagai alat penilaian kinerja.

